

POKOK-POKOK PIKIRAN
UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN
MELALUI PELAYANAN MINIMAL PENYULUHAN PERTANIAN DI BPP

Zahron Helmy

(Penyuluh pada Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian, Deptan-Jakarta)

ABSTRACT

Success in agricultural development is result of the developed and self-reliant nation in agricultural sector. There is dynamic reciprocal relationship between agricultural sector development and human development. Thus the agricultural development must become entry point to human development. It means that the transformation through agricultural development must able to create the social and economy transformation in the community. To achieve the objective, need the basic change from the current development that we are facing, i.e : provisioning orientation development plan in which the people as the object to be served, become empowerment oriented development plan, in which the people as development main doer and empower themselves to overcome the agricultural problem that they face. The change of development pattern is not only realized in Indonesia but also in the other country that face the agricultural problem. For that, various efforts has been arranged in the national and regional level to apply the community empowerment strategy. The new strategy demanded a basic change of the government's role in the central and regional from "PROVIDER-ENABLER", it means that development main doer is the community themselves.

Key words : empowerment oriented development, provider, enabler

PENDAHULUAN

Pengertian pemberdayaan masyarakat secara umum adalah upaya untuk membangun dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya masyarakat *marginal* agar tidak tertinggal dalam program dan proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat terjadi karena adanya pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan ekonomi dan kondisi fisik sosial ke pembangunan sumberdaya manusia. Selain itu juga pemberdayaan terjadi dikarenakan adanya kesenjangan yang disebabkan oleh sebagian masyarakat yang tidak mampu mengikuti proses transformasi yang terjadi dalam segala bidang (sosial, ekonomi, politik, pendidikan, demografi, teknologi, dan lain-lain), sehingga perlu diberdayakan agar tidak tertinggal. Dan akhirnya pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masyarakat mampu mengelola sumber daya baru yang dimilikinya serta dibukakan akses ke sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kehidupannya secara layak (Mahmudi, 1999).

Secara konseptual yang dimaksud dengan paradigma adalah tata nilai, pola pikir yang mempengaruhi citra subyek yang kemudian digambarkan sebagai suatu realita dan menjadi persoalan yang lebih kompleks. Kemudian realita tersebut menjadi tindakan-tindakan nyata dalam pemberdayaan. Pemberdayaan dimulai dari situasi yang bergantung (*dependensi*) tidak berdaya pada suatu proses pemberdayaan (*independensi*) menjadi lebih mandiri (*independensi*). Namun pada akhirnya dari pemberdayaan itu sendiri menciptakan saling ketergantungan (*interdependensi*) yang dikenal dengan kemitraan (*partnership*) (Slamet, 2003).

Strategi pemberdayaan dilakukan melalui pendekatan kelembagaan membuka akses ke sumber daya masyarakat menciptakan peluang-peluang pemberdayaan bagi masyarakat tertinggal dan marginal yang mampu terselenggara hidup yang layak. Melalui penggalangan potensi kelompok-kelompok masyarakat menciptakan wahana-wahana yang *compatible* dalam pranata normal, dimana masyarakat mampu mencapai kemajuan dalam membangun organisasi, lembaga, membangun, membentuk manusia

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan:

- 1) pembangunan kelembagaan (*institutional building*) dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif secara internal dan eksternal sehingga tercipta akses dan peluang bagi masyarakat dan masyarakat marginal khususnya,
- 2) pembangunan organisasi masyarakat untuk menggalang potensi kelompok masyarakat dan memberikan wadah kerja sama secara internal maupun eksternal sehingga menjadi satu kesatuan visi dan misi dalam pembangunan, dan
- 3) pembangunan sumberdaya manusianya sendiri, baik secara individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat.

semua upaya tersebut harus dilakukan dalam semangat kepemihakan dan perlindungan kepada masyarakat yang tertinggal khususnya melalui azas solidaritas, partisipasi, kemitraan, dan kemampuan untuk pemerataan (Aileen, 1998).

tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat pertanian adalah :

Meningkatkan kualitas sumberdaya pertanian terutama petani dan pelaku-pelaku usaha di bidang pertanian serta penyuluh pertanian,

Membangun masyarakat pertanian yang partisipatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian sampai kepada evaluasi program/proyek maupun kegiatan pembangunan pertanian,

Memampukan kemandirian masyarakat pertanian melalui keswadayaan,

Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat lokal dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan adalah dengan metode deskriptif melalui studi literatur dan data sekunder terhadap hasil-hasil kajian yang berkaitan dengan pembangunan pertanian, penyelenggaraan penyuluhan pertanian maupun hasil kajian

terhadap pemberdayaan masyarakat. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif (kualitatif) terhadap literatur dan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pertanian

Penerapan strategi pemberdayaan khususnya bagi masyarakat pertanian, dilakukan melalui pembangunan pertanian yang bertumpu pada masyarakat, dengan pelaku utama pembangunannya adalah masyarakat pertanian itu sendiri dan mendudukkan pemerintah hanya sebagai pemberdaya. Pembangunan pertanian bertumpu pada masyarakat adalah rancangan pembangunan yang mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utama dan diberdayakan agar mampu memecahkan persoalan-persoalan pertanian yang dihadapinya. Adapun proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap lingkungan pembangunan pertanian diartikan sebagai penciptaan akses dan peluang-peluang pembangunan bagi petani, kelompok-tani dan pelaku-pelaku usaha di bidang pertanian maupun kelompok-kelompok sasaran kepada sumberdaya-sumberdaya lokal, dalam bentuk membangun kapasitas (*capacity building*).

Strategi pemberdayaan masyarakat pertanian dalam hal ini diartikan sebagai upaya yang terencana untuk membangun, meningkatkan potensi masyarakat pertanian agar mereka mampu menanggulangi berbagai persoalan pertanian yang dihadapinya dengan baik dan benar, sehingga dapat mengejar ketertinggalan usaha-usaha di bidang pertanian baik antara sesama petani, antar wilayah pembangunan dalam satu provinsi maupun luar provinsi dalam satu negara, serta antar negara; seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Korea dan lain-lain.

Strategi ini merupakan salah satu bentuk pemihakan khususnya terhadap ketertinggalan masyarakat pertanian guna tercapai kesetaraan di bidang teknologi budidaya maupun bisnis usaha pertanian. Strategi-strategi pemberdayaan masyarakat pertanian dapat dilakukan melalui upaya-upaya :

- (1) membangun, membentuk kelembagaan pertanian di tingkat masyarakat desa sebagai kelembagaan yang mandiri, sehingga terbuka akses dan peluang ke sumberdaya kunci pembangunan bagi masyarakat tertinggal sehingga mampu menyelenggarakan usaha pertaniannya secara layak dan mencapai kemajuan,
- (2) membangun organisasi petani (kelompoktani-kelompoktani) untuk menggalang potensi kelompok masyarakat dan menciptakan wahana yang *compatible* dengan pranata formal yang ada di masyarakat,
- (3) membangun manusia pertanian khususnya petani dan keluarga, kelompoktani, pengusaha di bidang pertanian serta aparat pertanian di tingkat lapangan (penyuluh pertanian) untuk menciptakan manusia pertanian yang produktif secara ekonomi, efektif secara sosial sehingga mampu menentukan usaha pertanian yang maju, mandiri dan ramah lingkungan (Mahmudi, 1999).

Guna penciptaan model-model pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut, maka petani maupun masyarakat pertanian yang berminat, sekaligus bertindak selaku penyelenggara pembangunan pertanian dan atau bertujuan meningkatkan kualitas usaha pertaniannya, harus diorganisasikan, dibukakan akses ke sumberdaya-sumberdaya kunci (Coleman, 1999), seperti pendanaan, kepemilikan lahan (tanah), kepemilikan informasi teknologi, dukungan sarana dan prasarana lain, serta dukungan melalui pendampingan secara intensif dan berkesinambungan. Hal ini memungkinkan petani, kelompoktani dan pelaku-pelaku usaha di bidang pertanian mampu berperan sebagai pelaku utama pembangunan, yang dimulai dari penyusunan program pembangunan dan penggalangan potensi sumberdaya, sampai kepada pengelolaan lingkungan pertanian dan peningkatan penghasilan melalui pengembangan usaha-usaha maupun industri pertanian rumah tangga (*home industries*).

Salah satu contoh upaya pembangunan pertanian melalui pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan selama ini adalah melalui upaya

pengembangan kawasan agropolitan. Yang ini menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat wilayah dan memberdayakannya untuk bertindak sebagai pemilik pelaksana program/proyek maupun kegiatan pertanian sehingga seluruh nilai tambah yang terjadi dari proses penambahan nilai tersebut secara langsung dinikmati oleh masyarakat penghuni (setempat). Strategi pemberdayaan masyarakat pertanian melalui pendekatan agropolitan juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya terobosan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, menuju era tawar landas, kemandirian, dan swasembada pertanian (Deptan, 2001).

Selanjutnya guna mendukung penerapan pembangunan pertanian berbasis pada kelompok masyarakat tersebut, perlu dikembangkan pula; (1) sistem mikro dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) baik bagi petani, kelompoktani, sebagai bentuk terobosan penyediaan kredit bagi masyarakat pertanian yang berpenghasilan rendah melakukan pengembangan pertaniannya, (2) sistem penyuluhan di tingkat penyuluh pertanian berperan sebagai Fasilitator Pembangunan Pertanian di tingkat lapangan (lokal) yang mampu berperan hanya sebagai pendamping kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pertanian baik secara teknis budidaya maupun manajemen usahatani, tetap sedapat mungkin berperan aktif sebagai konsultan pembangunan pertanian. Agribisnis fasilitator pembangunan pertanian tersebut berperan lebih baik serta sekaligus dalam satu kode etik dan tata laksana yang mantap dan lebih menjamin semua aspeknya maka perlu di berikan wadah asosiasi sebagai wadah gerakan pembangun pertanian yang bertumpu pada kelompok masyarakat (seperti IP2M) (2003).

Menyadari masalah pembangunan merupakan masalah multi sektor dan multi disiplin karena tidak saja menyangkut aspek ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, juga merambah kepada isu politik, keamanan (ketahanan pangan), maka penyelenggaraannya diperlukan

dan pengendalian yang mantap di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Pusat sampai di tingkat Desa (petani dan kelompok tani), agar tercapai sinergi antara pelaku-pelaku pembangunan tersebut. Transformasi kelembagaan bukan saja untuk meningkatkan sinergi antara pelaku-pelaku pembangunan melainkan juga untuk lebih mampu menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang terjadi dalam pembangunan pertanian serta upaya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Pentingnya Kelembagaan Masyarakat Pertanian

Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma yang dilembagakan, dan mempunyai kegunaan untuk mencapai tujuan serta kepentingan hidup bersama. Lembaga ini terdapat dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang telah maju maupun masyarakat sederhana, karena setiap masyarakat pasti mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu yang apabila dikelompokkan dan diorganisasikan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Pada masyarakat maju jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan ini cukup banyak karena jenis kebutuhan masyarakat yang sangat banyak dan kompleks (Slamet, 1978).

Proses Pertumbuhan Lembaga Kemasyarakatan

Pertumbuhan lembaga kemasyarakatan itu bukanlah proses sekali jadi. Asal mulanya merupakan suatu kelaziman yang diikuti, kemudian berproses menjadi adat istiadat. Dengan demikian lembaga kemasyarakatan bukan saja merupakan sistem hubungan sosial dan prosedur tertentu dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, melainkan juga merupakan proses pengaturan perilaku individu dalam pergaulannya serta sangsi-sangsi yang disediakan terhadap pelanggaran norma dengan tujuan untuk terpelihara dan terbina pola-pola tata hubungan dan norma-norma yang telah diterima.

Kriteria supaya kaidah-kaidah itu menjadi lembaga kemasyarakatan adalah diketahuinya norma-norma tersebut oleh

sebagian besar anggota masyarakat, dan dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai norma atau kaidah yang berguna, serta anggota masyarakat mentaati norma-norma tersebut (Slamet, 2003). Norma dapat dibedakan atas empat tingkatan yaitu (1) *Usage*, cara bertingkah laku; (2) *Folkways*, perbuatan yang dilakukan berulang kali dengan cara yang sama; (3) *Mores*, tata kelakuan yang harus diikuti oleh anggota masyarakat untuk membantu ke arah terwujudnya keteraturan yang diharapkan oleh masyarakat. Dilain pihak *mores* mengusahakan agar masyarakat menerima seseorang menjadi bagian anggota masyarakatnya karena kesanggupan orang tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap masyarakat tersebut, (4) Adat istiadat merupakan norma yang terkuat daya pengikatnya sebelum ditingkatkan menjadi norma-norma hukum tertulis.

Norma-norma sosial berproses dari yang lemah daya pengikatnya menjadi yang kuat daya pengikatnya melalui tahapan mengenal, mengakuinya, menerima serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya menjadi lembaga kemasyarakatan (*institusionalisasi*).

Peranan Kelembagaan Petani dalam Pemberdayaan

Otonomi daerah yang lebih luas, secara sederhana dapat diartikan sebagai pengembalian hak pemerintah daerah dan masyarakat dalam menentukan arah serta mengelola pembangunan daerahnya secara lebih luas sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi, fisik maupun tantangan serta potensi untuk pembangunan secara spesifik. Cara pandang yang tengah bergulir pada berbagai aspek pembangunan adalah proses "demokratisasi" yang secara sederhana dapat diartikan sebagai semakin besarnya keharusan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Dewasa ini pembangunan tidak lagi dipandang sebagai bisnisnya para penguasa dan para pengusaha besar semata-mata, tetapi menjadi bagian dari yang harus dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Kondisi demikian tentu jelas bahwa wadah/lembaga kemasyarakatan yang dipercayai masyarakat harus ikut serta

berperan dalam pembangunan, dan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang dipercayai seluruh masyarakat, serta menjadi lembaga milik rakyat. Lembaga masyarakat ini berperan sebagai fasilitator dalam menghimpun aspirasi warga untuk melangsungkan pembangunan di wilayahnya, dan menjadi lembaga yang dapat mengkoordinir pelaksanaan proses-proses pembangunan. Berperannya lembaga-lembaga masyarakat lokal seperti itu, maka fungsi manajemen mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dapat dilaksanakan bersama-sama masyarakat, sehingga hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat merasa lebih memiliki (Sumardjo, 1999).

Di bidang pertanian, peranan kelembagaan-tani (kelompoktani) dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui keanggotaannya menjadi sangat strategis, mengingat seluruh aspirasi keluarga tani, kelompoktani, dan masyarakat pertanian umumnya, yang tertuang dalam setiap Rencana Usaha Pertanian Keluarga (RUPK), akan terjaring ke dalam Rencana Kegiatan Pertanian Kelompok (RKPK). Hal ini dimungkinkan, mengingat RKPK merupakan cerminan dari RUPK yang disusun berdasarkan skala prioritas, dan akan terlaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha pertanian kelompok yang mendapatkan dukungan dari Balai Penyuluhan Pertanian, Pemerintah Daerah setempat maupun instansi-instansi lain yang terkait baik pemerintah maupun swasta (Deptan, 2004).

Prioritas kegiatan setiap kelompoktani, bisa saja berbeda dengan kelompoktani lainnya, sehingga disadari pentingnya keterlibatan setiap kelompoktani (*interested group*) dalam proses perencanaan pembangunan pertanian di wilayahnya (desa) dalam bentuk penyusunan Rencana Kebutuhan Pertanian Desa (RKPD). Oleh sebab itu rembug-rembug petani maupun kelompoktani di tingkat lapangan maupun tingkatan wilayah pembangunan, kedudukannya sangat penting dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan pertanian menjadi suatu usulan program/proyek maupun kegiatan berbentuk

proposal, yang diajukan kepada pemerintah daerah setempat maupun kepada pihak-pihak pelaku usaha pertanian lain.

Munculnya masalah dalam kelompok besar masyarakat adalah dikarenakan adanya masyarakat marginal yang sering teridentifikasi. Padahal mereka harus terjangkau dikarenakan juga dari fasilitas infrastruktur yang disediakan pemerintah. Namun dikarenakan masyarakat marginal tersebut tidak pernah terlibat dalam organisasi-organisasi manapun dalam proses perencanaan pembangunan guna penyusunan prioritas dan menjadi tidak tersentuh oleh masyarakat luas. Penting sekali memulai penyusunan kelembagaan berdasarkan kepemilikan lahan keberhasilan seseorang dalam usaha akan tetapi lebih kepada perwakilan yang menghimpun aspirasi seluruh anggota masyarakat menjangkau seluruh lapisan masyarakat penyusunan perencanaan program/maupun kegiatan dapat menyentuh mengakomodir aspirasi dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tersebut.

Ketika prioritas terumuskan baik karena dukungan fasilitator berkualitas sehingga terjadi komunikasi intensif dari seluruh lapisan masyarakat akan menjadi ancaman bagi partisipatif jikalau program/proyek kegiatan tersebut ternyata mencerminkan kebutuhan kelompok diperjuangkan. Dewasa ini pembangunan berlomba-lomba pendekatan *community base* dan tapi efeknya tidak cukup berpengaruh kesejahteraan. Oleh karenanya pertanyaan sejauhmana peran masyarakat dalam fungsi kontrol, dan keberagaman mengemukakan pendapat (demokratisasi aspirasi).

Perlu diketahui bahwa kelembagaan adalah alat seseorang untuk membangun kepercayaan diri (*sense of competence*). Kelembagaan akan lebih mudah di tetapkan perencanaan dan pembangunan dengan individu-individu (masyarakat) ke dalam

lembaga-lembaga lokal yang mewakili aspirasi dan semua tingkatan dan membawa misi lembaganya. Tidak jarang setiap program/proyek maupun kegiatan itu selalu mendorong masyarakat untuk duduk dalam suatu kelompok agar dapat lebih mudah efisien dan efektif di dalam perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan penilaian terhadap keberhasilan dari suatu proses pembangunan, dikarenakan adanya kekuatan yang dimiliki melalui kelembagaannya. Guna pencapaian arah tersebut diperlukan fasilitator yang kuat, berkualitas dengan didukung oleh insentif lain selain materi, sehingga orang mau berpartisipasi dan berprestasi. Bagaimana kita memberikan informasi yang benar yang pada dasarnya memang perlu ada mediator masyarakat untuk merayu pemerintah dan sebaliknya untuk tercapainya tujuan yang dicita-citakan.

Pada dasarnya kualitas partisipasi itu dipengaruhi juga antara lain oleh kesiapan masyarakat dan kelembagaan dari masyarakat, walaupun tentu aspek birokrasi penting. Kelembagaan masyarakat itu tidak berarti organisasi formal tapi bisa saja perkumpulan yang informal, asosiasi informal. Namun terpenting kelembagaan itu ditandai adanya norma-norma yang disepakati bersama.

Berdasarkan hasil pengalaman lapangan, beberapa faktor yang bisa memperkuat kelembagaan masyarakat adalah apabila (1) lebih memberdayakan perempuan, (2) meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan, (3) kejelasan tujuan dari lembaga, (4) pelibatan tokoh masyarakat, (5) memperkuat kelompok-kelompok yang sudah ada dan mengaktifkan kembali kelompok yang sudah ada tetapi masih non aktif, (5) meningkatkan peran dan fungsi fasilitator pembangunan, (6) dukungan stimulan dalam hal keterampilan dan pelatihan, serta (7) pemberian kesempatan peningkatan kualitas, kaner dan penghargaan dari pemerintah. Dukungan lain yang harus dilakukan pemerintah daerah setempat adalah aspek legalitas atau kebijakan berupa peraturan (PERDA) yang lebih berpihak kepada masyarakat. Kelembagaan yang aspiratif tentunya akan terlegitimasi dan kemudian terbangun menjadi lembaga lokal. Inisiatif mengalir dalam masyarakat sendiri untuk

merencanakan, menilai kebutuhan, menyusun program, monitoring dan evaluasi. Disini terjadi tranformasi kapasitas kepada masyarakat dan proses internalisasi persoalan-persoalan program yang secara lingkungan berkelanjutan, secara sosial berkeadilan.

Pengorganisasian Masyarakat Pertanian

Pengorganisasian masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, terencana dan terarah untuk menggali, meningkatkan dan mengarahkan peran serta masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi yang ada, guna memecahkan sejumlah masalah yang mereka hadapi melalui suatu pendekatan program/proyek maupun kegiatan tertentu. Program/proyek maupun kegiatan pertanian dimaksudkan untuk menggali, meningkatkan dan mengarahkan peran serta masyarakat, karena yang diinginkan adalah tumbuhnya kemampuan masyarakat memecahkan sejumlah masalah sehingga pada akhirnya terjadi kemandirian masyarakat di bidang pertanian (Norman,1986). Tujuan pengorganisasian masyarakat yang juga merupakan tujuan edukatif dan percepatan pengembangan model, dapat dilihat dari berbagai dimensi, yaitu pengorganisasian bagi masyarakat setempat, bagi aparat pemerintah lokal dan bagi fasilitator pembangunan termasuk kelompok peduli pertanian serta bagi terciptanya model maupun perluasan areal pembangunan pertanian. Secara rinci tujuan dari pengorganisasian masyarakat pertanian adalah: (1) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat untuk melaksanakan diagnosa masalah masyarakat (*community diagnosis*), merumuskan upaya penanganan dan penanggulangan (*community prescription*), melaksanakan kegiatan penanggulangan (*community treatment*) serta menilai dan mengembangkan kegiatan selanjutnya (*community evaluation*), (2) mengatasi masalah usaha pertanian setempat dengan menggunakan sumberdaya setempat atau sumberdaya yang diakses melalui pihak-pihak lain, dan (3) memperluas kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses

pembangunan pertanian, melalui dukungan politis maupun ekonomis dari pihak luar.

Selanjutnya program/proyek maupun kegiatan tersebut mengutamakan penggunaan potensi setempat, karena prinsipnya adalah meningkatkan "tenaga dalam" masyarakat, melalui kesetiakawanan sosial yang sehari-hari dikenal dengan sebutan "gotong royong". Dengan bentuk kegiatan yang berlandaskan gotong royong inilah yang sebaiknya dikembangkan lebih lanjut secara sistematis dan terencana agar berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, dan dapat secara tepat diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat setempat khususnya masalah usaha pertanian, sehingga mampu meningkatkan derajat kualitas usahatani.

Serangkaian upaya pengorganisasian masyarakat ini memang dimulai dari bidang yang secara subyektif dirasakan oleh masyarakat, tetapi oleh penyuluh pertanian hendaknya secara bertahap diarahkan ke upaya mengatasi masalah yang obyektif. Aspek kebutuhan subyektif tetap diperlukan untuk menumbuhkan rasa memiliki sehingga tumbuh peran sertanya. Namun bila tanpa pengarahan kepada kebutuhan obyektif, peningkatan kualitas pertanian tentu tidak tercapai. Oleh karena itu, diharapkan peranan penyuluh pertanian sebagai fasilitator pembangunan pertanian di tingkat lapangan wajib secara bertahap mengarahkan peran serta masyarakat tersebut ke arah kebutuhan yang obyektif, untuk mengatasi masalah usaha pertanian yang sebenarnya. Tingkat penyebaran upaya ini diharapkan dapat berjalan dengan cepat, sejalan dengan bertumbuhkembangnya jumlah dan kualitas dari penyuluh pertanian sebagai fasilitator pembangunan pertanian di tingkat lapangan, serta kritisnya masalah pertanian yang dihadapi masyarakat pertanian di sentra-sentra produksi pertanian. Proses pengembangan kapasitas pelaku pembangunan pertanian khususnya petani, peneliti, penyuluh pertanian serta pelaku usaha di bidang pertanian perlu ditingkatkan kemampuannya dan memperoleh tempat utama (prioritas) melalui pendekatan pendidikan formal, kursus, pelatihan, studi

banding, magang, asistensi, magang, konsultasi, dan lain-lain.

Model pengorganisasian masyarakat melalui pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat, menempatkan kelompok masyarakat sebagai salah satu pelaku yang memotori proses pengambilan keputusan dalam seluruh proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan penilaian pembangunan hingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan tersebut. Selain bertumpu pada kelompok masyarakat, model ini bertumpu pada fasilitator, pendamping maupun konsultan pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, posisi fasilitator tidak merupakan profesi yang baru (Sumardjo, 2001). Hanya saja identitas sosialnya belum dikenal luas oleh masyarakat, dan peran sebagai katalisator sosial juga belum termuat dalam tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian sebagai fasilitator pembangunan. Oleh sebab itu terpenting adalah keabsahan (*legitimation*) dari keberadaannya yang tergantung pada unjuk kerjanya. Dan evaluasi terhadap unjuk kerja inilah yang menentukan penerimaan atas berbagai intervensi yang dijalankan.

Pilihan membangun kelompok sebagai medium antara masyarakat dan aktor lain termasuk konsultan pembangunan sangat tepat. Pembentukan kelompok, dan sendirinya merupakan suatu mekanisme seleksi terhadap unsur-unsur masyarakat yang memiliki kesiapan dasar terlibat dalam program/proyek maupun kegiatan. Di dalam kelompok terdapat suatu dinamika yang dapat diarahkan menuju identifikasi permasalahan masalah yang akurat dan perhitungan potensi sumber daya, serta alternatif pemecahan masalah. Pondasi awal bagi cikal bakal organisasi pembangunan pertanian telah dimulai dengan kelompok-tani-kelompok-tani. Pergerakan menunjukkan bahwa produktivitas petani menjadi prestasi yang fungsional sebagai kelompok dan masyarakat luas, petani dari kondisi usahatani, kemampuan umum seperti identifikasi dan kepemimpinan dan kerjasama, serta satu tawarnya terhadap organisasi lain karak sifatnya struktural.

Bagi perencana program pertanian, hal ini memberi pelajaran bahwa meskipun secara objektif belum terlihat hasilnya dalam pembangunan fisik, namun investasi pada pembangunan kelompok dalam tahapan perencanaan operasional merupakan hal yang penting. Gagasan untuk memperluas penerapan model pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas menuntut adanya ketersediaan sumberdaya fasilitator pembangunan pertanian yang memadai. Tiga hal yang perlu dilakukan yakni; (a) penggandaan tenaga dan pengembangan kapasitas penyuluh pertanian sebagai fasilitator pembangunan dan para pelaku lainnya; (b) penguatan profesi dan penguatan peran katalisator sosial, baik yang dijalankan oleh petani, penyuluh pertanian maupun pelaku pembangunan pertanian lainnya dan (c) penciptaan ruang implementasi yang lebih luas.

Perlu dipertimbangkan akan dibentuk suatu lembaga yang mengakomodasi ketiganya, sehingga daya lajah model ini memperoleh ruang dan akumulasi pengalaman. Penerapan model bisa dikonsolidasikan dalam rangka pengisian kebijakan dimasa yang akan datang. Sumber pembiayaan bagi penguatan model ini dalam konstelasi model-model pembangunan pemberdayaan perlu dicarikan pemecahannya. Pengambilan keputusan untuk pembiayaannya perlu dijabarkan strategi perolehan sumberdaya (*multy-sourcing strategy*). Dengan mengabdikan pada prinsip berkelanjutan, kompetisi model dalam konstelasi berbagai model pembangunan pertanian lainnya, dari awal tidak mengandalkan kepada proteksi dari 'pasar' yang berprinsipkan efisiensi. Perhitungan ekonomi dari model ini harus memperoleh manfaat yang utama, mengingat belajar dari pengalaman bahwa suatu model baru akan menuntut biaya institusi (*institutional cost*) yang besar.

Kelompok merupakan medium strategis yang dapat dipilih Fasilitator sebagai tempat untuk mengerahkan usahanya. Pilihan ini jauh lebih strategis daripada membangun masyarakat secara umum atau menangani individu satu demi satu secara langsung. Kelompok memiliki karakteristik dan dinamika yang khusus.

Penampilan kelompok akan jauh lebih besar daripada sekedar penjumlahan dari individu-individu anggotanya. Kelompok memainkan fungsi penting diantaranya;

- (1) kelompok sebagai agen kebudayaan. Seorang individu mendapat arahan tingkah laku berdasar pada nilai dan norma masyarakat yang berlaku; dipihak lain, perubahan nilai dan norma masyarakat selalu dimulai dari suatu kelompok.
- (2) kelompok menghubungkan kelompok individu dengan masyarakatnya. Individu mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya melalui keanggotaannya dalam suatu masyarakat tertentu,
- (3) kelompok lebih mudah dipelajari sehingga perubahan tingkah laku para anggotanya lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah dibanding dengan mempelajari dan merubah tingkah laku masyarakat secara makro.

Dalam kaitannya dengan masyarakat, kelompok merupakan pintu masuk menuju masyarakat. Melalui pintu ini upaya pengembangan masyarakat dimungkinkan. Ada 5 (Lima) hal yang menjelaskan kedudukan penting dari kelompok yaitu:

- (1) Kelompok tidak bisa dan tidak akan berhadapan dengan masalah praktis yang sehari-hari ditemui anggotanya. Permasalahan-permasalahan anggota kelompok adakalanya mendorong timbulnya perubahan, namun kelompok senantiasa memberikan pengaruh sosio-psikologis terhadap anggotanya,
- (2) Kehadiran kelompok adalah tidak terelakkan. Kodrat biologis manusia, kapasitasnya menggunakan bahasa dan kodrat lingkungannya terolah sedemikian rupa sehingga telah terbukti sejak ribuan tahun yang lalu, manusia hidup dalam kelompok. Walaupun perlu pula diberikan catatan bahwa mungkin saja manusia secara bersama hadir dalam kedekatan secara fisik tapi tidak berada dalam kelompok,
- (3) Kelompok memiliki suatu daya rekat tertentu terhadap anggotanya. Berbagai penelitian mengenai kekompakan kelompok (*group cohesiveness*)

menunjukkan pengaruh tersebut. Penelitian klasik menunjukkan bahwa semakin kompak suatu kelompok semakin rendah kadar kecemasan anggotanya. Secara umum, dapat disimpulkan, proses-proses dan kejadian-kejadian pada tingkat kelompok memberi pewarnaan pada kepribadian para anggotanya.

- (4) Kelompok dapat menghasilkan konsekuensi yang baik dan juga yang buruk. Dengan mempertimbangkan kedua sisi itu, akan didapat pemahaman yang lebih jelas mengenai kelompok dan upaya mengendalikan kelompok akan lebih terarah.
- (5) Pemahaman yang tepat terhadap dinamika kelompok memberikan manfaat yang berarti dalam menangani dan mendorong kelompok ke arah yang dapat merugikan.

Secara umum ada tiga alasan pokok yang menarik seseorang untuk bergabung dalam kelompok yaitu; (a) tertarik akan kegiatan kelompok, dimana semakin besar minat seseorang pada kegiatan kelompok, maka semakin besar pula potensinya untuk berpartisipasi, (b) menyukai orang-orang di dalam kelompok tersebut. Faktor ini selain merupakan faktor utama, juga membuat kelompok menjadi tempat seseorang menemukan pengalaman positif terhadap kelompok, yang pada gilirannya akan membuat orang tersebut memberikan andil bagi keberhasilan kelompok, (c) sebagai alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun kelompok tidak memenuhi kebutuhan secara langsung, namun seseorang dapat saja menganggap kelompok sebagai alat atau sarana untuk mencapai pemenuhan kebutuhannya.

Kelompoktani harus mampu mengikat anggotanya, sehingga harus memberikan (a) daya tarik bagi anggota, (b) kesamaan antar anggota (c) tujuan kelompok, (d) saling ketergantungan antar anggota kelompok, (e) aktivitas kelompok, (f) pola kepemimpinan kelompok, (g) struktur kelompok, (h) iklim kelompok, dan terpenting adalah (i) ukuran kelompok. Pada saat kelompok bekerja sama, maka ia dapat mencapai tujuan bersamanya. Untuk melakukan hal tersebut kelompok harus memiliki anggota-anggota dengan cakupan keterampilan dan kemampuan. Semakin besar

ukuran kelompok, tampak semakin luas beragam bakat keterampilan pengetahuan yang bisa ditampung. Kelompok yang terlalu kecil bisa jadi tidak efektif karena keterbatasan pengetahuan kolektifnya. Namun demikian bila kelompok terlalu besar, maka hambatan proses belajar juga bisa bermunculan. Individu-individu yang berbicara dalam diskusi dan yang lebih aktiflah yang akan membentuk kelompok. Kelompok yang terdiri dari orang-orang yang umumnya bisa bekerja baik untuk mencapai partisipasi dan produktivitas optimum.

Penyuluh Sebagai Fasilitator Pembangunan Reorientasi pendekatan pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan konsekuensi lain dari kebijakan pembangunan oleh pemerintah, antara lain penyediaan pembiayaan (dana), aspek teknis dan bantuan teknis (*technical assistance*) baik kepada perorangan, kelompok masyarakat dan para pengelola pembangunan maupun professional (Soedijanto, Univ Konsekuensi logis dari pembangunan adalah timbulnya kebutuhan akan fungsi-fungsi perantara (*Intermediary Functions*), serta peran masyarakat. Hal ini menjawab kenyataan bahwa kondisi masyarakat dengan kesederhaan dan keterbatasannya teknologi dan ekonomi), masih memerlukan upaya-upaya; pengarah, pendamping dan pembinaan. Selain itu diperlukan fasilitator untuk meng 'akses' sumber-sumber yang berada di luar jangkauan masyarakat.

Desakan kebutuhan Fasilitator Pembangunan dengan kegiatan konsultasi pembangunan didasarkan atas pertimbangan bahwa

- (1) pendekatan pembangunan dasarnya bertujuan menumbuhkan suatu produk, berinisiatif, melakukan komunikasi, akses kepada sumber-sumber diluar komunitas, melaksanakan penawaran

bersama secara setara dengan pihak-pihak lain.

- (2) pembangunan masyarakat meningkatkan kemampuan institusi (*institutional capacity*) komunitas untuk dapat membangun dirinya sendiri maupun bersama-sama mitra baik dari sektor swasta maupun pemerintah dan
- (3) sebagai suatu alternatif pembangunan yang diharapkan dapat memecahkan masalah kemiskinan, marginalisasi.

Pendekatan pembangunan dari bawah tersebut memerlukan penanganan yang terpadu bersifat sinergi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan proses "penyadaran dan pengembangan" masyarakat. Untuk itu diperlukan fungsi-fungsi perantara (*intermediary function*) untuk membawa masyarakat sehingga mampu membangun dirinya sendiri. Berbagai kelompok yang selama ini sudah sejak lama terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik dilakukan oleh LSM (sejak lama terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan), maupun dilakukan oleh KSM, Yayasan Sosial, LPM-Universitas, Koperasi dan bahkan Perseroan (PT/CV), yang dilakukan melalui; (a) upaya-upaya pengembangan masyarakat, (b) membantu mensintesakan pendekatan pembangunan dari atas dan dari bawah, (c) membantu perorangan-perorangan mengorganisir dirinya dan melaksanakan pembangunan bersama, (d) berbagai kegiatan selaku mediator atau katalisator pembangunan. Kesemuanya ini mencerminkan diperlukannya 'peran' dan 'fungsi' jasa konsultasi pembangunan baik oleh masyarakat, pemerintah, dan juga pihak swasta

Kebutuhan "Fasilitator yang dapat berperan sebagai konsultan pembangunan pertanian", sudah jelas. Kebijakan, strategi program-program pembangunan oleh pemerintah telah dirumuskan. Dana-dana pembangunan pemerintah maupun bantuan-bantuan luar negeri telah memprioritaskan pemecahan masalah-masalah kemiskinan, keterbelakangan, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), keterpaduan pembangunan, peningkatan peran serta masyarakat dan swasta (*public-private-community participation and partnership*).

Fasilitator pembangunan pertanian yang diharapkan muncul dan dimulai dari seorang penyuluh pertanian lapangan adalah seorang profesional yang memiliki kemauan pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan fisik dan kondisi sosial ekonomi usaha pertanian yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan kemampuan mereka melalui suatu upaya bersama. Fasilitator pembangunan pertanian merupakan petugas khusus yang mampu bertindak sebagai katalis, pengelola proyek, penasehat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan juga dituntut memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai pengantara dan penjalin sistem melalui proses penggalangan kelompok.

Oleh sebab itu tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian sebagai fasilitator pembangunan pertanian di tingkat lapangan harus berubah dan berorientasi kepada;

- (1) keberpihakan kepada kelompok masyarakat,
- (2) kemandirian kelompok masyarakat,
- (3) menjalankan fungsi sebagai fasilitator atau pendamping kelompok masyarakat,
- (4) merangkai berbagai pihak ke dalam iklim kemitraan,
- (5) mengupayakan pemberdayaan masyarakat miskin,
- (6) bersifat pro-aktif dan memiliki komitmen berkesinambungan,
- (7) tidak berorientasi pada target, tetapi pada proses
- (8) mengupayakan penyelesaian konflik, mengatasi masalah kelompok melalui informasi,
- (9) menerapkan pendekatan pembangunan bertumpu pada masyarakat yang berazaskan keadilan dan pemerataan, serta
- (10) menganut dan menjunjung tinggi integritas profesi, demokrasi, kemandirian, keterbukaan dan pembangunan berkelanjutan (Deptan, 2004).

Penyuluh sebagai fasilitator pembangunan pertanian perlu dihimpun dalam suatu '*platform*' untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, menerbitkan dan mengembangkan fungsi-fungsi "Fasilitator Pembangunan Pertanian",

guna mempercepat pemenuhan kebutuhan operasionalisasi pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat (Axinn, 1988). Untuk itu perlu dibentuk Ikatan ataupun Asosiasi penyuluh pertanian sebagai fasilitator pembangunan pertanian. Sejalan dengan ini, peran fasilitator pembangunan dalam bidang pertanian tidak semata-mata mewujudkan bangunan fisik saja, tetapi lebih jauh dari itu lingkup kegiatannya akan mencakup segi-segi sosial dan ekonomi masyarakat penghuninya.

Fasilitator pembangunan pertanian dibutuhkan peranannya untuk mendukung proses penggalangan kelompok tani-kelompok tani dan menjadi perantara sekaligus katalisator dalam menggalang sumber daya individu maupun akses ke pelaku pembangunan lainnya (seperti: Pemda, Bank, Swasta, pengusaha/pelaku bisnis bidang pertanian) serta menjalankan fungsi konsultasi pembangunan sebagai pendamping "Kelompok Membangun" mulai dari pembentukan kelompok, persiapan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sampai dengan manajemen pengelolaan lingkungan usaha pertanian. Dan kesemua pelayanan pada intinya bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan yang berlangsung pada kelompok-kelompok membangun yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Pendampingan secara kontinyu oleh fasilitator pembangunan adalah untuk membangun kemampuan masyarakat, merumuskan persoalan sendiri, mengambil sikap dan tindakan dalam menentukan masa depannya. Selanjutnya mengorganisasikan diri (individu) menjadi Kelompok terorganisasi sehingga mampu menggalang potensi kelompok agar dapat mengakses sumber daya kunci di luar kelompok (seperti: dana, teknologi), serta menyelenggarakan pembangunan swadaya secara lebih efektif dan efisien (teknologi, dana, manajemen).

Peranan penyuluh pertanian sebagai fasilitator pembangunan pertanian secara khusus ditelusuri dari tahapan penyelenggaraan meliputi:

(1) pengorganisasian,

Menyiapkan sosialisasi program, proses pengorganisasian kelompok peserta program, membantu pengurus kelompok

untuk mensintesis dan memberik
konsultasi dengan mencari alternatif-alterna
terhadap persoalan yang dihadapi kelompok (t
termasuk manajemen organisasi, manajema
keuangan menghimpun dana mitra (termas
segi hak, kewajiban, dan sangsi-sangsi).

(2) pemilihan dan penetapan lokasi,

Membantu mengumpulkan inform
dan rujukan lokasi sesuai dengan Renc
Tata Ruang Daerah (Bappeda/BPN) khususn
untuk pembangunan pertanian, beres
pengurus Kelompok mencari alternatif lok
dan memberikan masukan penilaian lok
berdasarkan berbagai syarat/kriteria, se
membantu Kelompok dalam mempersiapkan
dokumen untuk transaksi.

(3) perencanaan partisipatif,

Menyelenggarakan pemetaan lok
bersama kelompok tani dan masyarakat da
bentuk PRA untuk menyusun rekayasa
rancang bangun, membuat rencana angga
biaya (RAB), membuat rencana kegia
pelaksanaan pembangunan, jadwal kerja
manajemen,

(4) pengurusan perijinan dan sertifikasi

Membantu keluarga tani
kelompok tani dalam menyiapkan dokum
dokumen (laporan rencana, gambar-gam
teknis dan peta) untuk bahan prop
pengurusan perijinan dan sertifikasi da
rangka pengembangan usaha pertanian
peningkatan kualitas produk-p
pertanian.

(5) pengajuan kredit dan manajemen
usaha,

Membantu mencarikan, meny
proposal pengajuan kredit, mendan
kelompok tani menjalankan proses
negosiasi dan akad kredit, serta melal
kontrol (supervisi) secara teknis
manajemen terhadap pelaksana
penggunaan kredit sebagai suatu
antisipasi kegagalan dalam pema
kredit,

6) kegiatan pasca produksi.

Membantu kelompok tani (masyarakat) menyusun program pengelolaan Usaha Pertanian (*estate management*), melakukan pemantauan lingkungan, realisasi angsuran dan administrasi kelompok, menyiapkan program (perencanaan) dan pelaksanaan pendampingan untuk pengembangan kegiatan usaha kelompok.

Kondisi akhir yang diharapkan dengan terbentuknya penyuluh sebagai fasilitator pembangunan pertanian di tingkat lapangan adalah:

- 1) Menciptakan Iklim yang menunjang "propitas" (*Conducive*), dan perlu diwujudkan menjadi komitmen bersama sehingga secara sinergis percepatan program pemberdayaan masyarakat dapat secara operasional diterapkan di seluruh negeri. Dengan kata lain mempercepat tercapainya cita-cita pembangunan nasional, Aktor-aktor penting yang bertanggung jawab (Pemerintah, Asosiasi KP, Bank, Koperasi dan Swasta),
- 2) Pemerintah Pusat sampai dengan ke Daerah-daerah perlu menerapkan strategi pemberdayaan secara terpadu dan semua instansi terkait dan tunduk kepada kebijaksanaan yang telah diamankan GBHN. Sehingga dimungkinkan dikeluarkannya Keppres, guna keterpaduan dalam pembangunan.
- 3) Pelatihan secara kontinyu dan berjenjang di lingkungan aparatur pemerintahan hingga ke daerah-daerah tentang konsep pemberdayaan dalam pembangunan pertanian,
- 4) Menyiapkan instrumen-instrumen peraturan yang menunjang dan memungkinkan kemudahan kelompok tani dan masyarakat secara partisipatif melakukan pembangunan swadaya,
- 5) Mengalokasikan cukup dana (APBN/APBD) yang memungkinkan untuk diakses bagi kelompok masyarakat yang berinisiatif melakukan pembangunan swadaya, melalui perbanyakan 'proyek-proyek'

percontohan di daerah, terutama luar Jawa, dan melibatkan serta merangsang para sponsor (Lembaga donor) untuk terciptanya dana bergulir maupun dana jembatan yang dikelola dalam skala Daerah.

- (6) Jumlah masyarakat pertanian yang diberdayakan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian, perlu dijadikan suatu 'tolok ukur' bagi keberhasilan Daerah.

Tahapan Metodologis Pengembangan Masyarakat Pertanian

Pengembangan masyarakat pertanian memiliki tahapan yang berlaku untuk berbagai jenis petani, kelompok tani maupun kelompok masyarakat atau komunitas, yang pada dasarnya terletak pada membangun komitmen dan pengorganisasian masyarakat, evaluasi dan tahapan terminasi. Secara rinci tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Membangun Komitmen

Membangun komitmen merupakan tahap dimana terjadi kontak pertama dalam kepentingan program/proyek maupun kegiatan antara seseorang atau sejumlah anggota kelompok dan kelompok lainnya dengan Fasilitator pembangunan (masyarakat) di lapangan. Pada pembangunan pertanian, kontak kepentingan program/ proyek maupun kegiatan tersebut terjadi antara petani (keluarga tani) dan atau kelompok tani maupun masyarakat pertanian kepada aparat pemerintah, dalam hal ini penyuluh pertanian sebagai fasilitator pembangunan pertanian di tingkat lapangan. Secara prinsipil, pada tahap ini petani maupun kelompok tani menjajaki kemungkinan merealisasikan keinginannya melalui kontak dengan petani maupun kelompok tani lain dan fasilitator. Setelah saling menjajaki dilakukan usaha menggali informasi lebih jauh mengenai pihak-pihak yang dijajaki. Biasanya petani mencari sumber-sumber informasi yang dapat ia percaya. Dan sangatlah ideal bila sumber-sumber informasi tersebut adalah penyuluh pertanian yang bertindak sebagai fasilitator

dan merupakan agen pembangunan pertanian di tingkat lapangan.

Kecukupan informasi yang diperoleh harus ditindaklanjuti oleh petani maupun kelompoktani untuk melakukan identifikasi keinginan, kebutuhan tersebut kepada kelompok lain maupun aparat pemerintahan desa, guna penyatuan (*inkorporasi*) program/proyek maupun kegiatan dalam rangka mencapai komitmen. Tujuan tahap ini adalah membangun kepercayaan (*mutual trust*) dan kemitraan yang akan menjadi dasar pijakan relasi antara individu petani, kelompoktani dengan Fasilitator masyarakat. *Mutual trust* ini juga merupakan faktor yang menentukan apakah petani bersedia untuk *committed* terhadap kelompok maupun masyarakat di lingkungannya. Hal yang perlu dicermati dan sangat penting dalam terjadinya penyatuan tujuan adalah (1) terjadinya interaksi (saling mengenal) antar petani, melalui cara tukar menukar informasi tentang tujuan (bergabung dengan kelompok), keahlian/keterampilan yang dimiliki yang dapat disumbangkan pada kerja program/proyek, dan kesediaan untuk terlibat dalam berbagai upaya dan usaha di dalam kelompok, (2) terbukanya kesempatan pada petani/kelompoktani untuk memahami segala keuntungan dan kesulitan yang akan ditemui dalam proses perencanaan pembangunan pertanian di wilayahnya dan kalender kegiatan program/proyek yang mereka pilih, serta kemungkinan-kemungkinan kegagalan yang akan dihadapi.

Pengorganisasian Petani/Kelompoktani

Pengorganisasian adalah pengaturan atau pengelolaan, aktivitas meliputi mengenali kebutuhan-kebutuhan, menggali potensi, meneliti bahaya serta hambatan yang sudah ada maupun yang diantisipasi, kemudian membagi tugas, tanggung jawab dan wewenang. Selanjutnya adalah membangun mekanisme, menyediakan media komunikasi antar anggota maupun dengan kelompoktani-kelompoktani lain, menetapkan visi, misi dan tujuan kelompoktani, juga sasaran yang akan dicapai. Pengungkapan yang mulus pada tahapan ini akan mengantar kelompok ke suatu titik yang mengubah kelompoktani menjadi organisasi.

Dalam perjalanan program/proyek maupun kegiatan, tugas penyuluh sebagai fasilitator pembangunan pertanian di tingkat lapangan (masyarakat), dibantu oleh ketua kelompoktani, untuk melakukan pemantauan aktivitas dan dinamika kelompok. Kesulitan teknis, hambatan dan perkembangan masing-masing individu petani, munculnya kebutuhan-kebutuhan baru, menimbulkan dinamika kelompok yang bisa membawa pada berbagai perkembangan. Dan tidak dimungkinkan pada saat-saat seperti anggota kelompok merasa kecewa, patah semangat dan memutuskan untuk meninggalkan kelompoktannya. Penyuluh pertanian sebagai fasilitator dan ketua kelompoktani biasanya paling dipilih untuk membujuk para anggota, mengkomunikasikan kekecewaan, apatisme atau perasaan tidak dihargai secara individu petani untuk duduk bersama-sama dan melakukan evaluasi.

Tahap krusial yang sering terjadi dalam program/proyek maupun kegiatan pemberdayaan adalah analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan menjadi isu penting untuk mentransformasikan kebutuhan-kebutuhan individual petani menjadi visi kelompoktani terhadap pembangunan pertanian. Terdapat jenis kebutuhan yang perlu diangkat dalam tahap analisa kebutuhan meliputi: (1) *perceived needs*, yaitu kebutuhan yang dirasakan pada saat tertentu, (2) *Actual needs*, yaitu kebutuhan nyata, saat ini, yang tidak dirasakan atau disadari dan (3) *Anticipated needs*, kebutuhan-kebutuhan yang akan dirasakan di waktu mendatang. Hasil analisa kebutuhan akan memberikan gambaran tentang sasaran pembangunan masyarakat. Dengan demikian, dapat dibuat rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan kelompoktani, termasuk dalam perencanaan pembangunan adalah anggaran, pendanaan, pembiayaan, sumber-sumber pendanaan, langkah-langkah strategis, tahap-tahap pekerjaan teknis, pengaturan tentang siapa mengerjakan apa, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang dihubungi, serta kemungkinan sumber yang telah ditetapkan, pembangunan yang dilaksanakan. Perubahan atau pergeseran rencana sangat mungkin terjadi. Perubahan-perubahan biasanya disebabkan

berbagai kemungkinan faktor yang berasal dari dalam dan luar kelompoknya maupun yang bersumber pada kelompoknya sendiri. Faktor-faktor di luar, misalnya masalah birokrasi yang berkaitan dengan sumber dana, perolehan kredit, fluktuasi harga bahan baku produksi, kondisi lahan, dan lain-lain. Faktor dalam berkaitan dengan dinamika kelompok, perubahan kebutuhan, keterampilan yang dikuasai, gagasan baru yang lebih menjawab kebutuhan, dan lain-lain.

Evaluasi

Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui apakah kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keluaran dari tahap-tahap sebelumnya yaitu komitmen dan pengorganisasian merupakan tolok ukur melaksanakan evaluasi. Selain itu, evaluasi disini juga harus memperoleh gambaran tentang tingkat kemandirian kelompoknya maupun masyarakat sebagai indikator penting dalam menetapkan kesiapan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada Fasilitator. Hasil dari evaluasi adalah gambaran keberhasilan kelompoknya maupun masyarakat serta berbagai rekomendasi untuk memperkuat kelompoknya dan masyarakat dalam tahap-tahap perkembangan program/proyek maupun kegiatan.

Terminasi (Pemutusan Hubungan)

Salah satu tolok ukur keberhasilan program/proyek maupun kegiatan adalah apabila proses pendampingan oleh fasilitator pembangunan selesai, usaha-usaha pembangunan pertanian oleh masyarakat sendiri yang bersendikan visi, misi, prinsip serta nilai penyuluhan pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, strategi melestarikan kegiatan ini menjadi sangat penting untuk disadari mulai dari awal program/proyek maupun kegiatan. Sehingga strategi tersebut sebaiknya telah tercermin cara inheren dalam semua langkah-langkah tahapan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan. Dasar pemikiran terminasi dalam pembangunan pertanian melalui pendekatan penyuluhan pertanian adalah apabila; (1) kehandalan tata laksana dan tata hubungan kerja, sistem operasi

dan prosedur yang selama ini telah dijalankan fasilitator pembangunan (penyuluh) dapat terus berlangsung di masyarakat, (2) terjadinya transformasi peran dengan terbentuknya kader-kader pembangunan pertanian yang bertindak selaku pemandu dan bertugas mengembangkan, melestarikan visi, misi, prinsip serta nilai-nilai penyuluhan pertanian,

Indikator keberhasilan dari suatu strategi pemberdayaan masyarakat pertanian melalui pendekatan penyuluhan pertanian adalah apabila terjadi:

- (1) perubahan perilaku secara kolektif dari semua pihak (*stakeholders*) yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian,
- (2) gerakan di masyarakat berdasarkan "kebersamaan" untuk menanggulangi persoalan pertanian di wilayahnya,
- (3) kemitraan sinergi antara pemerintah, masyarakat, kelompok peduli
- (4) beberapa "contoh" kasus (*best practices*) untuk menjadi model yang dapat direplikasi dan didiseminasikan kepada kelompok/warga, kabupaten, maupun provinsi lain.
- (5) mekanisme "kontrol sosial" dimasyarakat untuk terus memelihara dan mengembangkan penyuluhan pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyelenggara penyuluhan pertanian dituntut memiliki (1) visi, (2) misi, (3) orientasi, (4) tujuan dan (5) strategi mencapai cita-cita penyuluhan yang diselenggarakannya, yaitu merubah perilaku (pengetahuan sikap dan keterampilan) petani agar berusahatani lebih menguntungkan sehingga mencapai kesejahteraan. Untuk dapat memberikan pelayanan penyuluhan berkualitas, maka pelaksanaan kelima rumusan tersebut di atas, harus jelas, mudah difahami oleh semua pihak khususnya penyuluh pertanian itu sendiri dan dilaksanakan dalam alam yang nyata berdasarkan kondisi spesifik lokasi. Selanjutnya penyelenggara penyuluhan harus

mampu menyiapkan, menyediakan dan menyajikan segala jasa informasi yang diperlukan untuk petani. Informasi tentang berbagai komoditas pertanian seperti komoditi sayuran, palawija, hortikultura, komoditi perkebunan, peternakan maupun informasi lain meliputi aspek ekonomi, teknologi pasca panen, pengolahan, pengawetan, maupun yang berhubungan dengan pengolahan dan pemasarannya. Hal ini mendorong penyuluh pertanian untuk mampu mengidentifikasi kepentingan petani dan menuangkannya ke dalam program penyuluhan melalui kerjasama yang erat dengan petani. Dan untuk mencapai itu maka para penyuluh harus dibekali seperangkat pengetahuan maupun keterampilan yang berkaitan dengan komunikasi sosial, psikologi sosial, stratifikasi sosial.

Guna menghasilkan penyuluhan yang prima, maka penyelenggaraan penyuluhan tidak hanya bergantung pada kualitas sumberdaya penyuluhnya saja ataupun pelaku-pelaku usaha di bidang pertanian, tetapi juga harus didukung dengan kondisi fisik dan fasilitas pendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian itu sendiri. Prasyarat minimal yang harus dimiliki agar penyelenggaraan penyuluhan dapat merespon aspirasi petani adalah; (1) Pengokohan kelembagaan penyuluhan di tingkat masyarakat (BPP), sehingga nantinya diharapkan dapat tercipta wadah organisasi yang mampu menjadi wadah perjuangan kaum petani dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Kelembagaan masyarakat yang bersifat lokal tersebut diharapkan menjadi motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan permasalahan pertanian, (2) Penguatan Manajemen "DEDIKASI" ditingkat BPP, (3) Pembentukan BPP Model di setiap Kabupaten (4) Penguatan Sistem Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan (5) Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi.

1. Pengokohan Kelembagaan BPP

Kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat paling bawah (kecamatan) yang dikenal dengan sebutan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam proses

percepatan pembangunan pertanian, tugas dan fungsi penyelenggaraan penyuluhan di wilayah. Hal ini dikatkan BPP sebagai perpanjangan tangan pemerintah terbawah, secara langsung berhubungan dengan pelaku-pelaku pertanian dalam hal ini peternak, peneliti, penyuluh dan pelaku usaha di bidang pertanian serta kelompok-kelompok pembangunan pertanian.

BPP diharapkan dapat terselenggaranya penyuluhan secara prima melalui:

- (1) tersedianya fasilitas untuk program/ program dan rencana penyuluhan pertanian, mengakomodir kebutuhan petani pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, memperhatikan aspek-aspek lingkungan.
- (2) tersedianya fasilitas untuk menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, produk, pasar dan pemasaran.
- (3) tersedianya fasilitas kerjasama peneliti, penyuluh dan petani/kontak dan pelaku agribisnis lainnya.
- (4) tersedianya fasilitas untuk mengajar-belajar dan pertemuan antara petani, peneliti dan pelaku pertanian lainnya.
- (5) tersedianya fasilitas informasi dokumentasi dalam perpustakaan,
- (6) tersedianya fasilitas percontohan bentuk lahan dan rumah kaca (*house*) dan
- (7) tersedianya fasilitas pengembangan model-model usahatani dan agribisnis.

Guna kelancaran pelaksanaan dan fungsi penyelenggaraan tersebut maka dipandang perlu secara fisik dalam bentuk bangunan yang memadai, dengan fasilitas relatif modern, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Selanjutnya juga didukung dengan susunan dan struktur maupun unit-unit kerja penyuluhan tersebut. Kelembagaan penyelenggara berikut fasilitas minimal di tingkat secara rinci dapat dilihat pada

Mengingat tugas dan fungsi tersebut, maka keberadaan BPP harus dekat dengan petani dan masyarakat pertanian yang menjadi sentra produksi pertanian. Ini diperlukan agar fungsi kelembagaan yang diharapkan sebagai pusat dinamisasi, pendidikan, pendampingan, inovasi, Kaji Tindak, Akselerasi, Supervisi dan implikasi dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Adapun kedudukan BPP di setiap kecamatan, dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai unit kerja organik penyuluhan pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat/Kepala Wilayah Kecamatan dengan wilayah kerja satu wilayah administrasi kecamatan atau kelurahan/desa, yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota/Walikota Kepala daerah Tingkat II. Berhasil tidaknya penyelenggara penyuluhan berkualitas sangat bergantung kepada jumlah dan mutu dari para petugas yang melaksanakannya (penyuluh, peneliti). Oleh sebab itu syarat pertama yang harus dimiliki agar dapat memberikan pelayanan prima adalah; (1) memiliki kecintaan dan kepedulian terhadap tugas dan tanggungjawab, serta kesadaran bahwa tugas tersebut tidak dapat dilakukan secara sendiri karena terkait dalam suatu kesisteman usaha pertanian, (2) memiliki keahlian dan keterampilan dalam penanganan yang menjadi tugasnya dalam bentuk tindakan persuasif maupun represif.

Penguatan Manajemen "DEDIKASI"

Keberlanjutan pembangunan pertanian melalui pendekatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di BPP, juga harus didukung dengan program/proyek maupun kegiatan yang berkesinambungan, yang merupakan kumpulan dari aspirasi petani, kelompok-tani maupun masyarakat lokal yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Penyuluhan Desa (RKPD) dan Rencana Kegiatan Desa (RKD). Keseluruhan program/proyek maupun kegiatan tersebut selain harus memperhatikan kemampuan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, juga berprinsip kepada manajemen DEDIKASI yang dikembangkan di BPP. Manajemen DEDIKASI merupakan sistem pengelolaan BPP baik menyangkut potensi sumberdaya alam di wilayah kerja BPP

maupun sumberdaya manusianya (petani, penyuluh, pengusaha, kelompok peduli pertanian) dengan berlandaskan kepada manajemen mutu terpadu yang bertumpu kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan Dinamisasi, Edukasi, Dampingan, Inovasi, Kaji Tindak, Akselerasi, dan Supervisi serta Implikasi. Secara rinci uraian akan manajemen DEDIKASI dijelaskan sebagai berikut:

a) *Dinamisasi*; yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kesesuaian program/programa dan struktur kelembagaan terhadap kondisi spesifik lokasi.

Program/programa yang dinamis adalah programa yang mampu mengakomodasikan seluruh strata sosial dan ekonomi masyarakat pertanian di wilayah itu, baik mencakup kelompok-kelompok marginal, miskin, maupun komunitas minoritas lainnya, yang tidak teridentifikasi di dalam sebuah kelompok (kelompok-tani) apapun, padahal mereka juga bagian dari masyarakat tersebut. Sedangkan dinamisasi kelembagaan, adalah kondisi dimana struktur organisasi kelembagaan BPP tersebut disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam yang ada dan kemampuan ataupun kapasitas sumberdaya manusianya. Idealnya struktur organisasi kelembagaan tersebut dapat mewakili kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakat khususnya bidang pertanian.

b) *Edukasi*; adalah suatu proses pendidikan bagi petani, pengusaha di bidang pertanian dan petugas pertanian (penyuluh).

Proses pendidikan bagi pelaku-pelaku pembangunan pertanian tersebut harus berkesinambungan dan secara terus-menerus, dengan kurikulum berjenjang yang mampu mengangkat derajat petani, pengusaha maupun penyuluh pertanian menjadi ahli. Program pendidikan hendaknya diberikan secara berjenjang, mulai dari pendidikan yang bersifat teknis budidaya meliputi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan maupun perikanan, sampai kepada manajemen usaha (produksi, pengolahan dan pemasaran hasil). Pendidikan yang diberikan maupun yang diperoleh pelaku-pelaku

pembangunan pertanian tersebut lebih dititik beratkan melalui jalur pendidikan non formal yang sedapat mungkin mencerminkan keilmuan dari setiap sektor (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan), dan dapat diperoleh ataupun diberikan melalui metode kepelatihan, diklat, magang, kursus, studi banding, praktek lapang, dan lain-lain. Dan dari program pendidikan inilah kita dapat menghasilkan sumberdaya-sumberdaya manusia yang berkualitas.

- c) Dampingan; adalah suatu proses pembangunan pertanian yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat sendiri, tetapi juga di fasilitasi oleh penyuluh sebagai fasilitator pembangunan pertanian juga oleh pelaku-pelaku pembangunan pertanian lainnya.

Pendampingan yang dilakukan, tidak hanya terbatas kepada pembangunan aspek fisik (teknis budidaya) dan ekonomi (produksi dan pemasaran), tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain seperti sosial-budaya (kemasyarakatan), dan lingkungan. Terlebih penting adalah pendampingan kepada petani, kelompok tani dan masyarakat pertanian lainnya harus dimulai dari manajemen perencanaan program/proyek maupun kegiatan (persiapan), pengorganisasian, pelaksanaan sampai kepada penilaian dari sebuah program/proyek maupun kegiatan di tingkat lapangan. Keberhasilan dari sebuah program/proyek maupun kegiatan sangat bergantung selain kepada kemampuan dan kreativitas pendamping juga ditentukan oleh intensitas dan kualitas pertemuan. Mengingat kelembagaan BPP berada dalam satu wilayah kecamatan, maka pendampingan bekerja dalam satu kesatuan tim berjumlah minimal 5-10 orang yang mewilayahi satu kecamatan dan minimal satu orang pendamping mewakili 1-2 wilayah kelipatan desa.

- d) Inovasi; sesuai dengan fungsi BPP adalah pengelola percontohan dan penyelenggara penyuluhan di tingkat yang paling bawah, maka harus dimulai untuk melakukan inovasi-inovasi oleh petani, kelompok tani bersama-sama peneliti dan penyuluh guna

mendapatkan sesuatu yang baru atau menyangkut teknologi ekonomi pemasaran, manajemen usaha.

Program dalam rangka inovasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kegiatan yang rutin bagi pelaku-pelaku pembangunan pertanian, dan diorganisasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dan dari inovasi inilah kita akan menghasilkan produk-produk spesifik lokalitas yang berkualitas dan mempunyai daya saing. Peranan kelembagaan BPP dalam rangka inovasi adalah mengidentifikasi petani-petani maju dan kelompok tani unggulan yang berperan sebagai inovator dalam usahatani. Dan sesuai dengan kebutuhan tersebut maka konsentrasi inovasi hendak dapat difokuskan pada petani-petani kelompok tani tersebut berikut fasilitas pendukung berupa informasi-informasi teknologi maupun pembiayaan (sarana produksi).

- e) Kaji tindak; selama ini hasil-hasil penelitian dari Litbang Pertanian ataupun berbagai kebijakan serta pendekatan penyuluhan BPP yang dikeluarkan pemerintah pusat, dirasa belum banyak menyentuh petani/kelompok tani kecil (garapan). Padahal kita ketahui bersama bahwa sebagian besar petani kita adalah petani gurem. Hal ini berakibat kesulitnya pemerintah kita menciptakan sentra-sentra produksi bagi petani. Hasil penelitian tersebut menunjukkan peningkatan ekspor dengan kontur yang relatif stabil sepanjang tahun mengingat sulitnya mengembarkan hasil tersebut ke dalam skala yang luas.

Oleh sebab itu hasil-hasil penelitian baik berupa kebijakan maupun di lapangan, perlu dilakukan kajian teknologi dan kebijakan pemerintah baik kebutuhan petani/kelompok tani masyarakat pertanian. Penyuluh harus bekerjasama di tingkat tindak-lanjut dan penerapan hasil

Salah satu upaya percepatan pertumbuhan ekonomi pertanian adalah dengan memberikan dukungan finansial bagi masyarakat pertanian untuk mengembangkan usahatani. Dukungan finansial tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kredit mikro yang terjangkau bagi petani-petani gurem dengan skala usaha kecil (ekonomis) maupun berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagaimana yang selama ini berjalan. Kredit mikro maupun BLM yang dimaksud, diperuntukkan sebagai proses pembelajaran bagi petani kecil sebelum melakukan kredit secara komersial dengan pihak perbankan. Sistem yang dibangun adalah dengan melakukan pendampingan kepada keluarga petani dan kelompok-tani ataupun masyarakat pertanian sampai masyarakat tersebut mampu menyusun proposal kegiatan yang merupakan cerminan dari Rencana Usaha Pertanian Keluarga (RUPK), Rencana Kegiatan Pertanian Kelompok (RKPK) maupun Rencana Kegiatan Pertanian Desa (RKPD).

Keseluruhan rencana yang tersusun mulai dari tingkat keluarga, kelompok maupun yang diangkat menjadi rencana tingkat desa, untuk mendapatkan dukungan pembiayaan baik oleh pemerintah, swasta dan donor, maka dilakukan seleksi oleh Penyuluh sebagai Fasilitator yang berkedudukan di BPP bersama dengan Dewan Perwakilan Desa, untuk kemudian disusun skala prioritas dari masing-masing desa sewilayah Kecamatan. Skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan, diteruskan ke pemerintah daerah tingkat Kabupaten untuk mendapatkan studi kelayakan dari Tim Pembangunan pertanian tingkat Kabupaten yang terdiri dari unsur-unsur lingkup pertanian (dinas Peternakan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan), PU Pengairan, Perdagangan dan Industri. Studi kelayakan tersebut diperlukan untuk melihat kesiapan dan keseriusan serta kelayakan dari prioritas program yang diusulkan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa proposal yang diajukan dan sudah mendapatkan

skala prioritas dapat dibatalkan apabila dianggap tidak layak atau mengada-ada. Adapun anggaran diperuntukkan sebagai pembangunan pertanian tersebut, ada anggaran APBN, APBD I, II, maupun anggaran khusus penyelenggaraan penyuluhan pertanian pusat dititipkan di daerah, yang dijabarkan sebagai dana pemberdayaan kelompok dengan sistem BLM. Sedangkan untuk bagi Penyuluh sebagai Fasilitas didapatkan dengan cara seberapa banyak proposal yang diajukan itu dicairkan oleh pemerintah daerah setempat. Didapatkan melalui rekening langka keluarga, kelompok maupun desa. Besarnya insentif tergantung dari proposal yang dicairkan dan jumlah tergantung dari nilai bimbingan pendampingan yang dicantumkan dalam proposal tersebut. Jika mode berjalan sebagaimana yang diharapkan maka harapan terjadinya pergeseran peran penyuluh dari fasilitator pembangunan pertanian (pemerintah) menjadi konsultan pembangunan pertanian (swasta) akan terwujud. sistem kompetensi tersebut dapat berjalan.

3. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Selama ini sistem monitoring evaluasi sering diabaikan. Tidak ada monitoring dan evaluasi hanya dilakukan sebagai standar dalam pelaksanaan program/proyek maupun kegiatan. Sehingga sering program/proyek kegiatan yang disusun tidak berkelanjutan, bahkan tidak berkesinambungan. Perubahan sistem monitoring sangat diperlukan, dengan unsur manajemen ini memegang peranan penting dalam keberhasilan keberlanjutan serta pengembangan program/proyek maupun kegiatan. Perubahan yang dimaksud adalah kerangka mengukur kinerja dari sistem program/proyek maupun kegiatan tersebut. sebab itu hal pertama yang dilakukan adalah:

 - (1) menyiapkan format monitoring yang dapat diukur

secara kualitatif maupun kuantitatif. Format tersebut harus mencerminkan kondisi awal, kemajuan, masalah, perkembangan, yang dilihat dari aspek ekonomi, teknis, maupun sosial,

- (2) format isian dapat merupakan isian ringkas untuk keluarga, kelompok, desa yang melaksanakan program/proyek maupun kegiatan tertentu,
- (3) menyusun rangkaian format isian tersebut menjadi suatu program di komputer untuk kemudian dilakukan on-line melalui sistem internet,
- (4) melakukan monitoring secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali, dan melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengukur tingkat kemajuan dan pengambilan keputusan penerusan, pengalihan, pemberhentian program/proyek maupun kegiatan.

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi seperti ini akan mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu;

- 1) dapat mengukur tingkat kemajuan dari sebuah program/proyek maupun kegiatan,
- 2) dapat mengukur kinerja dari penyuluh yang bersangkutan sebagai fasilitator pembangunan di wilayah kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Allen Mitchell Stewart. 1998. *Empowering People*. Terjemahan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia. Kanisius. Yogyakarta.

Chinn, George H. 1988. *Guide on Alternative Extension Approaches*. FAO. Of United Nation, Rome.

Coleman, J.S. 1999. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Dasgupta, P and I. Serageldin. *Social Capital a Multifaceted Perspective*. Washington : World Bank.

Departemen Pertanian. 2001. *Pembangunan Sistem Agribisnis sebagai Penggerak*

Ekonomi Nasional. Jakarta. Departemen Pertanian.

Departemen Pertanian. 2003. *Program Nasional Pengembangan Penyuluhan Pertanian*. Badan Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.

Departemen Pertanian. 2004. *Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan dalam Era Otonomi Daerah*. Badan Pengembangan SDM Pertanian. Jakarta.

Korten, David C. 1984. *Pembangunan yang Memihak Rakyat*. Jakarta. Lembaga Studi Pembangunan.

Norman, Uphoff. 1986. *Local Institutional Development: An Analysis Sourcebook With Cases*. Cornell University. Kumarian Press.

Mahmudi, Ahmad. 1999. *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat*.

Slamet, M. 1978. *Beberapa Catatan tentang Pengembangan Organisasi*. dalam *Kumpulan Bahan Bacaan Penyuluhan Pertanian*. Edisi ketiga. IPB. Bogor.

Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB Press. Bogor.

Soedijanto, 2003. *Penyuluhan sebagai Pilar Akselerasi Pembangunan Pertanian di Indonesia pada Masa Datang*. Badan Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian.

Sumardjo. 1999. *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani*. Bogor. Disertasi Doktor Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.